

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekjen MK RI.
- (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Konstitusi Press.
- (2006). *Perihal Undang-undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Budiardjo, M. (2008). *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Diantha, I. M. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Fakih, M. (2009). *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press.
- Farida, M. (2007). *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Firmansyah, R. M. (2013). *Catatan Kinerja DPR 2012: Fondasi Tahun Politik*. Jakarta: PSHK.
- Fuady, M. (2007). *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Harun, R. (2010). *Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Huda, N. (2002). *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII.
- (2007). *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Hanitijo, R. (1990). *Metodologi Penelitian dan Yurimetri*. Semarang: Ghalia Indonesia.
- HR, M. (2010). *Rekonstruksi Konsep Keadilan*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Isra, S. (2009). *Kekuasaan dan Perilaku Korupsi: Catatan Hukum*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH., LL.M.* Bandung: Alumni.
- Manan, B. (1987). *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Armico.
- (2003). *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mahfud, M. (2006). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

- Moonti, R.M. (2017). *Ilmu Perundang-undangan*. Makassar: Keretakupa.
- Muliadi, A. (2012). *Politik Hukum*. Jakarta: Universitas Jayabaya.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- (2006). *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Saifullah. (2007). *Refleksi Sosiologi Hukum*. Semarang: Refika Aditama.
- Sidharta, B. A. (2010). *Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung: FH Unika Parahyangan.
- Soekanto, S. (2001). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soeprapto, M. F. I. (2020). *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Penyusunan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suharno. (2020). *Mengadili Kebijakan: Perspektif Demokrasi dan Negara Hukum*. Solo: CV. Indotama Solo.
- Sujamto. (1986). *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sukrino, D. (2013). *Hukum, Konstitusi, dan Konsep Otonomi*. Malang: Setara Press.

Suratman, & Dilla, H. P. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Tjandra, W. R. (2009). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo.

Utsman, S. (2009). *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yusdiansyah, E., & Siallagan, H. (2008). *Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. Medan: UHN Press.

B. Jurnal

Anggono, B. D. (2019). Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan yang Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 704.

Arinanto, S. (2006). Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi. *Jurnal Konstitusi*, 3(3), 79.

Arliman, L. (2016). Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai *State Auxiliary Bodies* dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Justitia et Pax*, 32(2), 44.

Dalimunthe, D. (2017). Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Yurisprudentia*, 3(1), 77.

- Evandy, A. (2016). Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-undangan dalam Perspektif Politik Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 10(4), 611.
- Faqih, M. (2019). Proses Pembentukan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. *Mimbar Yustitia*, 3(2), 171.
- Febriansyah, F. I. (2016). Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Perspektif*, 21(3), 226.
- Indraputra, T. G., & Bagiastra, I. N. (2014). Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Bantu. *Jurnal Kertha Negara*, 2(5), 3.
- Layuck, K. M; Watulingas, R. R; & Rondonuwu, D. E. (2020). Pengawasan Pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat Menurut UU Nomor 9 Tahun 2015. *Lex Administratum*, 8(3), 127.
- Marzuki, Djalil, H., & Mujibussalim. (2017). Kedudukan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Menjalankan Fungsi Legislasi. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(3), 65.
- Maulana, M. R. (2018). Upaya Menciptakan Produk Hukum Berkualitas Konstitusi Melalui Model Preventif Review. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 775.

- Mudjiono. (2007). Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan. *Jurnal Hukum*, 14(3), 470.
- Nuryadi, D. (2016). Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*, 1(2), 403.
- Pardede, M. (2013). Peran Penelitian Hukum yang Dilaksanakan Oleh Organisasi Bantuan Hukum dalam Mendukung Pembangunan Hukum. *Jurnal RechtsVinding*, 2(1), 131.
- Pradipta, F. (2013). Kedudukan Lembaga Negara Bantu dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Advokasi*, 4(2), 45.
- Risnain, M. (2015). Konsep Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Program Legislasi Nasional: Rekomendasi Konseptual dan Kebijakan pada Prolegnas 2015-2019. *Jurnal Rechtsvinding*, 4(3), 405.
- Ristyawati, A. (2019). Penguatan Partai Politik sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian dan Pelembagaan Demokrasi. *Jurnal Administrative Law dan Governance*, 2(4), 713.
- Rizki, M. R. (2022). Kajian Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat di Masa Pandemi. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 5(1), 32.
- Rokilah. (2019). Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 20.

Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), 136.

Soemarsono, M. (2007). Negara Hukum Indonesia Ditinjau dari Sudut Teori Tujuan Negara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 37(2), 300.

Sugiman. (2020). Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD NKRI 1945. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 178.

Ubbe, A. (2005). Instrumen Prolegnas dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Terencana dan Terpadu. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2(1), 16.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M. 03-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. Dokumen Lainnya

Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2008. *Tiga Dekade Prolegnas dan Peran Badan Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. "*Majalah Hukum Nasional*" Nomor 2 - 2008, hlm. 4.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 839.

Kementerian PPN/Bappenas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024 (Jakarta: 2019).

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. 2012. *Legislasi: Aspirasi atau Transaksi*. Jakarta: PSHK.

Safitri, A. (2013). *Tinjauan Yuridis Normatif Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*. (Tesis Magister, Universitas Muhammadiyah Malang, 2013) Diakses dari <https://eprints.umm.ac.id/28227>

Supandri. (2015). *Kedudukan Lembaga Negara Bantu dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah) Diakses dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30369>

E. Internet

Anjar, A. (2019). *CekFakta #30 Demo Mahasiswa, Apa yang Sebenarnya Terjadi?*. Diakses pada 6 Desember 2022, dari <https://newsletter.tempo.co/read/1283938/cekfakta-30-demo-mahasiswa-apa-yang-sebenarnya-terjadi>

Dewan Perwakilan Rakyat. (2020). *Program Legislasi Nasional Prioritas*. Diakses pada 7 Mei 2023, dari <https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas>

Mahkamah Konstitusi. (2022). *Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang*. Diakses pada 7 Desember 2022, dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU>

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jember. (2015). *Menggagas Prolegnas Berkualitas*. Diakses pada 25 Mei 2023, dari <https://www.jember.ac.id/publikasi/menggagas-prolegnas-berkualitas>

Wismabrata, M. H. (2018). *Kasus Korupsi Massal di DPRD Kota Malang, Ini Sejumlah Faktanya*. Diakses pada 14 Februari 2023, dari <https://regional.kompas.com/read/2018/09/04/15100021/kasus-korupsi-massal-di-dprd-kota-malang-ini-sejumlah-faktanya>